

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM TATA KELOLA EKONOMI DAN SOSIAL DARI PERSPEKTIF *DYNAMIC GOVERNANCE* DI PROVINSI BALI

Dewa Ketut Suryawan^{1)*}, I Gede Agus Wibawa²⁾, Ni Putu Dinda Kalpika Putri³⁾.

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa
Denpasar, Bali, Indonesia
suryawandk@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa
Denpasar, Bali, Indonesia
wibawa.agus@gmail.com

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa
Denpasar, Bali, Indonesia
dindakalpika94@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan digital yang pesat menjadi sebuah kekuatan transformasional dalam pembangunan suatu negara khususnya pada tata kelola pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju mampu memberikan berbagai manfaat besar bagi masyarakat. *Global north* selalu dijadikan rujukan untuk pengembangan digital diseluruh dunia. Perkembangan digital di *global north* dan *global south* tentu berbeda, perbedaan mendasar terletak pada proses tahapan ketika menjalankan strategi pengembangan digital. Khususnya jika dilihat dari konteks Provinsi Bali, lonjakan kunjungan wisatawan yang pesat akan menimbulkan krisis-krisis lainnya seperti fenomena *overtourism*, kemacetan, alih fungsi lahan bahkan isu ketenagakerjaan. Maka dari itu, peneliti fokus untuk melihat bagaimana dampak dan tantangan transformasi digital dalam bidang sosial dan ekonomi di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan pengaruh yang signifikan pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Bali. Dengan menggunakan teori *dynamic governance*, maka tata kelola pemerintahan Bali sudah berjalan dinamis dalam merespon transformasi digital hanya saja kebijakan mengenai pekerja informal belum diatur dengan jelas.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Ekonomi, Sosial

ABSTRACT

Rapid digital development has become a transformational force in national development, particularly in governance. Increasingly sophisticated information technology can provide significant benefits to society. The global north has always been a benchmark for digital development worldwide. Digital development in the global north and global south is certainly different, with the fundamental difference lying in the stages involved in implementing digital development strategies. Specifically, in the context of Bali Province, the rapid surge in tourist visits will give rise to other crises such as overtourism, congestion, land conversion, and even employment issues. Therefore, this researcher focused on examining the impacts and challenges of digital transformation on the social and economic aspects of Bali Province. The research method used was a qualitative approach, with data collection through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that digital transformation has significantly influenced social and economic life in Bali. Using dynamic governance theory,



Balinese governance has been dynamic in responding to digital transformation, but policies regarding informal workers have not been clearly regulated.

Keywords: *Digital Transformation, Economy, Social*

PENDAHULUAN

Perkembangan digital yang terjadi diseluruh belahan dunia saat ini merujuk pada konteks *global north*. Proses digitalisasi akan terus berjalan dan mengalami perkembangan secara berkelanjutan. Negara-negara di kawasan *Global north* menjadi pusat berbagai proyek digital berskala besar, seperti *Project Gutenberg, the Internet Archive, HathiTrust and Europeana, Ancestry.com, Google Books and Google Arts and Culture*. Sehingga hal ini memberikan perbedaan yang cukup signifikan antara perkembangan digital di *global north* dengan *global south*. Strategi transformasi digital di *global north* terdiri dari empat tahap yang dimulai dari riset mengenai pengembangan teknologi informasi; membuat pasar global untuk pelayanan, produk dan teknologi digital; memastikan kepemimpinan dalam pasar global; dan menjaga pasar domestik dari kompetisi pasar global (Adolph, 2025). Sedangkan dalam *global south* hanya terdapat tiga tahapan, yang membedakan *global north* dan *global south* adalah tidak adanya proses pertama yaitu riset perkembangan digital.

Digitalisasi menjadi sebuah kekuatan transformasional dalam pembangunan suatu negara. *The United Nation Declaration on the Right to Development* mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses yang mencakup sistem ekonomi, sosial, budaya dan politik secara menyeluruh, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip partisipasi dan keadilan (Chankseliani et al., 2021). Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Masing-masing negara tentu telah memiliki rencana pembangunan yang merujuk pada *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Saat ini perkembangan pembangunan global berada di persimpangan jalan, satu sisi ingin mengarah pada pembangunan berkelanjutan namun pada sisi lainnya ditemukan adanya krisis-krisis yang terjadi dalam proses transformasi digital. Krisis seringkali terjadi akibat dari kurangnya perencanaan yang matang dan komprehensif.

Krisis adalah peristiwa yang berpotensi menyebabkan perubahan besar yang merugikan sistem sosial di suatu negara (Walby, 2022). Krisis-krisis yang saling berkaitan satu sama lain terjadi secara bersamaan kemudian disebut dengan istilah "*polycrisis*". Satu krisis akan sering memicu atau memperburuk krisis lainnya, krisis yang saling berinteraksi dapat menghasilkan dampak yang sama bahkan bisa memberikan dampak yang lebih buruk (Adolph, 2025). Salah satu krisis yang dirasakan yaitu munculnya kesenjangan digital (*digital divide*) yang menjadi sebuah tantangan bagi negara berkembang. Sebagaimana yang disebutkan dalam buku *Bridging the Global Digital Divide* mengatakan bahwa kesenjangan digital sering menjadi aspek baru dari hubungan antara negara maju dan berkembang (Mammen et al., 2023). Sebagai bagian dari negara-negara *Global South*, Indonesia terus mendorong pengembangan digitalisasi melalui inisiatif *e-government* sejak diterbitkannya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) (Yudhiantara et al., 2024). Pemerintah Indonesia menjalankan gerakan 100 *smart city*, dengan tujuan utama yaitu membimbing kabupaten/kota dalam menyusun masterplan *smart city* agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.



Dilihat dalam konteks Provinsi Bali sebagai provinsi yang sumber perekonomian utama dari sektor pariwisata, meningkatnya jumlah wisatawan memberikan dampak pada proses transformasi digital. Provinsi Bali sebagai urutan keempat sumber daya manusia paling maju di Indonesia (liputan6.com, 2024) dengan total jumlah indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai skor 77,76 (BPS RI). Angka ini menunjukkan bahwa semestinya sumber daya manusia di Provinsi Bali dapat beradaptasi secara maksimal dalam proses digitalisasi. Namun, peningkatan jumlah wisatawan yang drastis menimbulkan banyaknya tenaga kerja asing. Kini wisatawan yang datang tidak lagi datang ke Provinsi Bali untuk menikmati alam atau berwisata, banyak wisatawan yang kemudian memilih untuk bekerja. Sebagaimana yang diberitakan dalam Balipost.com, peluang kerja di Bali saat ini mulai banyak diisi oleh tenaga kerja asing. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi tenaga kerja lokal, khususnya di kawasan pariwisata (balipost.com, 2024). Sektor pariwisata memang merupakan tonggak dalam pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain dapat menimbulkan krisis seperti adanya fenomena *overtourism*, kemacetan, alih fungsi lahan dan isu ketenagakerjaan.

Hal ini juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dikarenakan tidak ada pendapatan pasti dan jaminan sosial. Selain itu, menurut data BPS Bali tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 mencapai angka 50,68 ribu orang (balipost.com, 2024). Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana dampak dan tantangan transformasi digital dalam bidang sosial dan ekonomi di Provinsi Bali?”

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Proses analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data terlebih dahulu, kemudian mereduksi data melalui proses pengodean dan peringkasan kode, serta tahap akhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel maupun pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kondisi nyata dalam perkembangan transformasi digital terutama dampak dan tantangannya dalam bidang sosial dan ekonomi di Provinsi Bali. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Bali. Menurut (Cresswell, 2015) menjelaskan bahwa metode kualitatif berpijak pada paradigma postpositivisme yang memandang hubungan sebab-akibat sebagai kemungkinan yang dapat terjadi maupun tidak terjadi. Paradigma ini ditandai oleh pendekatan yang bersifat reduksionis, logis, empiris, serta berfokus pada hubungan kausal. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara di Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan Dinas Ketenagakerjaan serta ESDM Provinsi Bali. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pemerintah dan pemberitaan media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital menjadi katalisator dalam mendorong inovasi dan keberlanjutan pembangunan. Perkembangan teknologi digital ini mempengaruhi seluruh bidang kehidupan masyarakat khususnya pada bidang ekonomi dan sosial. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan budaya, proses kerja dan struktur organisasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi tersebut (Subekti, 2024). Transformasi digital akan mendorong budaya untuk berinovasi, kolaborasi dan adaptasi dalam seluruh proses organisasi di seluruh bidang kehidupan baik itu bidang ekonomi maupun sosial. Transformasi digital kini menjadi tren global pembangunan dalam bidang ekonomi dan sosial. Pembangunan global efektif ketika transformasi digital mencakup bisnis, ilmu pengetahuan, bidang sosial, dan kehidupan sehari-hari warga negara.



Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya untuk mempercepat laju transformasi digital dengan mengeluarkan kebijakan Bali *Smart Island*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali, bahwa perencanaan *Bali Smart Island* ini hal tersebut tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2018 – 2023. Implementasi kebijakan ini yaitu pemasangan layanan wifi gratis dan penyediaan aplikasi untuk layanan publik. Tahun 2023, wifi gratis telah tersebar sebanyak 2619 buah di lingkungan kabupaten/kota Provinsi Bali (balisatudata.baliprov.go.id, 2024). Berdasarkan data dari balisatudata, sebaran wifi gratis terbanyak dengan jumlah 538 buah di Kabupaten Tabanan. Program ini memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat Bali, salah satunya lebih mudah untuk mengakses informasi secara *online* dan mempermudah pelayanan publik berbasis website maupun aplikasi. Walaupun banyak manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat, layanan wifi ini diberhentikan mulai tanggal 1 Januari (balipost.com, 2025). Pemberhentian program penyelenggaraan *free* wifi mengacu pada Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor: B.31.900/7883/PADFE.BPKAD terkait pagu sementara belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota se-Bali dalam APBD tahun 2025.

Provinsi Bali sebagai bagian dari *global south* khususnya pada bidang pariwisata. Lonjakan wisatawan yang sangat cepat dengan jumlah yang banyak menimbulkan fenomena *overtourism*. *Overtourism* merupakan kondisi ketika jumlah wisatawan yang datang ke suatu destinasi melebihi kapasitas maksimal yang mampu ditampung atau dikelola oleh kawasan tersebut dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dapat memberikan dampak lainnya seperti kemacetan, alih fungsi lahan hingga isu ketenagakerjaan. Fenomena ini kemudian disebut dengan istilah “*polycrisis*” yaitu krisis-krisis yang saling berkaitan satu sama lain terjadi secara bersamaan dan bisa memberikan dampak yang lebih buruk (Adolph, 2025). Fenomena *overtourism* yang terjadi di Provinsi Bali menimbulkan banyaknya tenaga asing yang lebih bisa beradaptasi dengan teknologi digital. Berdasarkan data BPS, pengangguran justru paling banyak di daerah yang perkembangan pariwisatanya maju yaitu di daerah Badung, Gianyar, Denpasar dan Buleleng sebanyak 72.421 orang. Data dari Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali mencatat hingga periode 2023 telah tercatat 3.600 TKA dalam lingkup lapangan pekerjaan di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun daerah-daerah yang perkembangan pariwisatanya sudah maju, belum tentu daya serap tenaga kerja bisa maksimal.

Dari permasalahan tersebut, banyak masyarakat Bali yang semula bekerja di hotel, restoran maupun sektor formal lainnya di bidang pariwisata kemudian berpindah pada sektor informal seperti menjadi ojek *online*. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 tahun 2019 tentang Layanan Angkutan Sewa Khusus berbasis Aplikasi, penyelenggaraan angkutan telah diatur berdasarkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan layanan. Saat ini, terdapat sembilan aplikator yang resmi beroperasi yaitu Grab, Gojek (*Gocar*), Jayamahe *Easy Ride*, *Blue Bird*, *Ray Car*, Maxim, *Draiv*, Bali Cab dan *AirAsia Ride*. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali, hingga 16 November 2022 tercatat sebanyak 10.289 unit kendaraan yang telah memiliki izin operasional Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan terdaftar serta terverifikasi dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) (dishub.baliprov.go.id, 2022).

Salah satu platform ojek *online* yaitu Gojek, menyampaikan bahwa hingga Oktober 2021 jumlah pengemudi Gojek di Bali mencapai sekitar 5.000 orang dengan sebaran presentase di Kota Denpasar sebanyak 35%, Kabupaten Badung 30%, Kabupaten Gianyar 20% dan Kabupaten Tabanan 15%. Maraknya ojek *online* dan meningkatnya pekerja yang memilih sektor informal akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan tidak ada pendapatan pasti dan jaminan sosial yang jelas dari pekerjaan informal khususnya ojek *online*.



Pendapatan yang diperoleh *driver* ojek *online* tidak menentu, menurut data yang dilansir pada teknologi.bisnis.com, Grab Indonesia menyatakan bahwa pendapatan tertinggi mitra pengemudi Grab roda dua dapat mencapai Rp. 6,8 juta per bulan (teknologi.bisnis.com, 2025). Sementara itu, pendapatan mitra pengemudi roda empat dapat mencapai sekitar Rp. 18 juta per bulan, sedangkan pendapatan terendah yang diperoleh berkisar Rp. 1,3 juta. Namun, pendapatan tersebut masih harus dikurangi dengan potongan biaya aplikasi sebesar 20%, biaya operasional 30% dan biaya perawatan sebesar 20%. Sehingga jika dihitung kembali total yang diperoleh oleh *driver* hanya 30% dari total pendapatan. Pendapatan juga tentu dihitung dari lamanya waktu bekerja. Jika ingin memperoleh pendapatan yang lebih banyak, otomatis waktu yang dicurahkan oleh *driver* harus lebih banyak.

Selain dampak ekonomi, transformasi digital juga memberikan dampak sosial seperti memberikan konsekuensi terhadap relasi sosial, identitas pekerjaan, dan solidaritas komunitas. Berikut ini penjelasan dari masing-masing dampak sosial yang dirasakan oleh pekerja informal ojek *online* yaitu:

1. Relasi sosial atau hubungan sosial merupakan interaksi dan koneksi antara individu atau kelompok dalam kehidupan masyarakat sangat penting yang berperan dalam membentuk kualitas kehidupan dan kesejahteraan individu dan kelompok (Hanafi & Yasin, 2023). Fleksibilitas waktu memungkinkan pekerja memiliki waktu lebih lama untuk bersama keluarganya. Namun, kondisi tersebut berbeda bagi pengemudi ojek *online* yang memiliki banyak tanggungan keluarga, karena mereka harus bekerja lebih keras dan dalam waktu yang lebih lama untuk mencapai target pendapatan. Banyak jumlah tanggungan dalam satu kepala keluarga dapat menyebabkan meningkatnya kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi demi menjaga kelangsungan hidup (Purbadharmaja & Manuaba, 2019). Maka, transformasi digital akan mempengaruhi relasi sosial. Jika pekerja ojek *online* lebih memilih bekerja dengan waktu yang lebih lama, maka waktu bersama berkumpul dengan keluarga akan semakin berkurang. Sehingga memungkinkan relasi dengan keluarga bisa merenggang.
2. Identitas pekerjaan atau cara individu menggambarkan dirinya dalam dunia kerja merupakan salah satu fenomena yang muncul dalam hubungan internasional antarpekerja, baik dalam sektor formal maupun informal (Sudamika, 2018). Pekerjaan masyarakat Bali sebelum adanya transformasi digital lebih banyak yang bekerja di sektor formal khususnya di bidang pariwisata. Sebagaimana yang disebutkan dalam semakin kuatnya peran dari teknologi digital termasuk hadirnya *Internet of Things*, *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Human Machine Interface*, *Robotic* dan *Sensor Technology*, telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat maupun individu (Yasa, 2022). Sehingga banyak pekerja lokal Bali memilih pekerja informal seperti ojek *online*. Hal ini tentu akan memberikan gambaran nyata terkait dengan implikasi transformasi digital khususnya pada identitas pekerjaan. Asumsi masyarakat dari identitas pekerjaan dalam sektor informal saat ini yaitu seringkali menganggap bahwa sektor informal identik dengan skala aktivitas ekonomi yang kecil, tidak mendapatkan jaminan sosial, dinilai tidak terlalu produktif.
3. Solidaritas sosial merupakan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok dalam masyarakat yang dibangun atas ikatan perasaan dan kepercayaan bersama, serta diperkuat oleh pengalaman emosional yang dialami secara kolektif (Safitri & Syukur, 2022). Implikasi transformasi digital dalam pekerjaan masyarakat Bali menimbulkan terbentuknya komunitas ojek *online* di berbagai wilayah khususnya di Denpasar, Gianyar dan Badung. Pekerja ojek *online* di Bali khususnya Grab membentuk Komunitas *Solidarity Grab Community* (SGC) Bali.



Komunitas ini membangun solidaritas sosial baru diluar komunitas tradisional untuk menampung pendapat serta saling membantu satu sama lain. Seperti yang dikutip dalam *website radarbali.jawapos.com*, SGC Bali menyampaikan pernyataan resmi bahwa mereka tetap mendukung skema potongan komisi 20% yang telah diterapkan selama ini oleh aplikator (Anwar, 2025). Selain menumbuhkan solidaritas antar anggota, komunitas ini juga merupakan wadah advokasi pekerja ojek *online*.

Dynamic Governance digunakan untuk menganalisis konteks dampak transformasi digital dalam bidang sosial dan ekonomi di Provinsi Bali. Dalam menghadapi transformasi digital, diperlukan pemerintah yang dinamis agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat.

1. *Thinking Ahead*

Dalam menghadapi transformasi digital, Pemerintah Provinsi Bali telah meluncurkan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya mempercepat transformasi digital yaitu dengan adanya kebijakan Bali *Smart Island* yang merupakan salah satu program kepala daerah terpilih tahun 2018-2023 yang telah tertuang dalam RPJMD (2018-2023). Hanya saja, dampak yang diberikan oleh transformasi digital belum sepenuhnya diatasi. Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki visi jangka panjang terkait pergeseran struktur pekerjaan akibat digitalisasi. Banyak kebijakan masih berfokus pada sektor formal dan belum mengantisipasi pertumbuhan sektor informal digital. Sebagaimana yang dikutip dari *baliexpress.jawapos.com*, bahwa data sakernas menunjukkan adanya tantangan serius dalam struktur ketenagakerjaan di Bali, dimana sektor informal masih mendominasi, hal ini menandakan bahwa kerentanan pada jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja dan kestabilan pendapatan (Riyanti, 2025).

2. *Thinking Again*

Saat ini, ketentuan mengenai pekerja informal berbasis platform di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 564 Tahun 2022 yang mengatur perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor dan penetapan batas tarif bagi layanan transportasi daring (Retnaningsih & Ghofarany, 2024). Berdasarkan hal tersebut maka regulasi yang melindungi hak-hak pekerja informal berbasis *platform* di tingkat pusat belum memadai. Hal ini juga berdampak kepada pemerintah daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kebijakan struktur ketenagakerjaan di Provinsi Bali akibat dampak dari adanya transformasi digital. Refleksi terhadap kebijakan ketenagakerjaan belum mempertimbangkan dinamika pekerja *platform* atau pekerja ojek *online*.

3. *Thinking Across*

Pemerintah Provinsi Bali berkolaborasi dengan pemerintah desa adat dan swasta. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali yaitu *job fair offline* dan *online* yang difasilitasi melalui platform *Siapkerja* dan media sosial Dinas Tenaga Kerja. Dalam kegiatan tersebut sudah terdata lebih dari 2.000 lapangan kerja dari 33 badan usaha (Riyanti, 2025).

Transformasi digital tentu akan mempengaruhi seluruh bidang kehidupan masyarakat khususnya bidang sosial dan ekonomi. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Provinsi Bali secara kuantitas sudah memadai, hanya saja perlu adanya peningkatan kualitas agar dapat menghadapi pergeseran pekerjaan yang diakibatkan oleh transformasi digital. Ini juga dapat memberikan dampak sosial juga seperti relasi sosial, identifikasi pekerjaan dan solidaritas komunitas. Jika dianalisis dengan *dynamic governance*, transformasi digital di Provinsi Bali yaitu Pemerintah Provinsi Bali telah menjalankan tata kelola dinamis dimana Pemerintah Provinsi Bali telah berupaya untuk menjalankan



kebijakan Bali *Smart Island* yang membantu proses akselerasi transformasi digital. Hanya saja kebijakan terkait tentang pekerja informal berbasis platform belum secara rinci dituangkan dalam regulasi sehingga hal ini perlu evaluasi kebijakan yang telah dijalankan.

SIMPULAN

Transformasi digital dapat mempercepat proses pembangunan di suatu negara. Dengan adanya digitalisasi, masyarakat dapat dimudahkan dengan berbagai layanan berbasis teknologi yang dapat memberikan efektivitas dan efisiensi. Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang cukup cepat merespon transformasi digital dengan mengeluarkan kebijakan Bali *Smart Island*, kebijakan ini diimplementasikan dengan pemasangan wifi gratis di beberapa titik di Provinsi Bali. Transformasi digital membawa dampak pada bidang sosial dan ekonomi masyarakat Bali. Akibat persaingan dengan tenaga asing yang lebih bisa menggunakan teknologi digital, banyak tenaga kerja lokal yang beralih pekerjaan ke sektor informal. Namun, pendapatan yang diterima secara bersih hanya sekitar 30% dari total pendapatan karena adanya berbagai potongan biaya dari pihak aplikasi ojek *online*.

Hal ini tentu mempengaruhi pendapatan masyarakat, pendapatan setiap bulan yang diperoleh tidak menentu. Selain bidang ekonomi, dampak sosial yang dirasakan yaitu relasi sosial, identitas pekerjaan dan solidaritas sosial. Dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan yang dinamis (*dynamic governance*) telah diterapkan dalam proses transformasi digital, khususnya di Provinsi Bali, dengan memperhatikan tiga aspek utama, yaitu *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*. Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan agar Pemerintah Provinsi Bali memperhatikan kembali kebijakan ketenagakerjaan khususnya yang berada di sektor informal agar jaminan sosial dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, pelaksanaan transformasi digital yang akan dilaksanakan seharusnya dapat memperhatikan kembali masyarakatnya khususnya kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2025). Polycrisis and Economic Development in The Global South. In R. Rena (Ed.), *Routledge Studies in Development Economics* (1st ed., pp. 1–23).
- Anwar, R. (2025). *Keberlanjutan Platform Lebih Penting dari Sekadar Angka, Komunitas Driver Online SGC Bali Dukung Komisi 20 Persen*. RadarBali.Jawapos.Com. <https://radarbali.jawapos.com/ekonomi/706321059/keberlanjutan-platform-lebih-penting-dari-sekadar-angka-komunitas-driver-online-sgc-bali-dukung-komisi-20-persen>
- balipost.com. (2024a). *Kualitas Tenaga Kerja Bali Masih Rendah*. 16 November. <https://www.balipost.com/news/2024/11/16/427728/Kualitas-Tenaga-Kerja-Bali-Masih...html>
- balipost.com. (2024b). *Pengangguran Terbuka di Bali Capai 50,68 Ribu Orang*. 7 Mei. <https://www.balipost.com/news/2024/05/07/399099/Pengangguran-Terbuka-di-Bali-Capai...html>
- balipost.com. (2025). *Bantuan Wifi Gratis Pemprov Bali*. 14 Januari. <https://www.balipost.com/news/2025/01/14/437032/Bantuan-Wifi-Gratis-Pemprov-Bali...html>
- balisatudata.baliprov.go.id. (2024). *Lokasi Penyelenggaraan Akses Free Wifi Bali Smart Island*. <https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/lokasi-penyelenggaraan-akses-free-wifi-bali-smart-island?year=2023>
- Chankseliani, M., Qoraboyev, I., & Gimranova, D. (2021). Higher education contributing to local, national, and global development: new empirical and conceptual insights. *Higher Education*, 81(1), 109–127. <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00565-8>
- Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan (Ketiga)*. Pustaka Belajar.

- dishub.baliprov.go.id. (2022). *Press Release Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali*. 18 November. <https://dishub.baliprov.go.id/pers-release-kepala-dinas-perhubungan-provinsi-bali/>
- Hanafi, A., & Yasin, M. (2023). Upaya Memperkuat Hubungan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, 1(2), 51–62. <https://doi.org/10.71382/sinova.v1i2.19>
- liputan6.com. (2024). *15 Provinsi di Indonesia dengan SDM Paling Maju, DIY dan Kaltim Pepet Jakarta*. 4 Desember. <https://www.liputan6.com/hot/read/5818713/15-provinsi-di-indonesia-dengan-sdm-paling-maju-diy-dan-kaltim-pepet-jakarta?page=2>
- Mammen, J. T., Rugmini Devi, M., & Girish Kumar, R. (2023). North–South digital divide: A comparative study of personal and positional inequalities in USA and India. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 15(4), 482–495. <https://doi.org/10.1080/20421338.2022.2129343>
- Prasetyo, M. W., & Yasa, I. N. M. (2024). Pengaruh Kebijakan Ppkm, Insentif, Dan Flexitime Terhadap Pendapatan Pengemudi Gojek Masa Pandemi Covid-19 Di Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(02), 311. <https://doi.org/10.24843/eeb.2024.v13.i02.p10>
- Purbadharmaja, I. B. P., & Manuaba, I. A. R. A. (2019). Terhadap Keputusan Seseorang Yang Menjadikan Jasa Transportasi Online Berbasis Aplikasi (Go-Jek) Sebagai Pekerjaan Sampingan Di Kota Denpasar. *Jurnal EP Unud*, 8(4), 735–767.
- Retnaningsih, H., & Ghofarany, E. M. (2024). Peluang, Tantangan, dan Upaya Pelindungan Pekerja Informal Berbasis Platform Sektor Transformasi. *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI*, 16(21), 21–25.
- Riyanti, R. (2025). *Pekerja Informal di Bali Masih Dominan, Wagub Giri: Semua Masalah Ada Solusinya*. Baliexpress.Jawapos.Com. <https://baliexpress.jawapos.com/bali/676300384/pekerja-informal-di-bali-masih-dominan-wagub-giri-semua-masalah-ada-solusinya?page=2>
- Safitri, I. A., & Syukur, M. (2022). Solidaritas Sosial antar Pengemudi Ojek Online dan Ojek Konvensional di Kabupaten Bone. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.26858/pjsr.v1i1.24112>
- Subekti, Ohyver, D. A. (2024). *Transformasi Digital: Teori & implementasi Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. (Issue May).
- Sudamika, D. (2018). Memaknai Identitas Diri Pekerja Perempuan (Buruh Cuci Pakaian) di Pondok Pesantren Daar el-Qolam Gintung Balaraja Tangerang. *Januari*, 1(1), 63–73.
- teknologi.bisnis.com. (2025). *Driver Grab Jakarta vs Bali: Jam Kerja Lebih Lama, Pendapatan Lebih Kecil*. 21 Juni. [https://teknologi.bisnis.com/read/20250621/84/1887024/driver-grab-jakarta-vs-bali-jam-kerja-lebih-lama-pendapatan-lebih-kecil?](https://teknologi.bisnis.com/read/20250621/84/1887024/driver-grab-jakarta-vs-bali-jam-kerja-lebih-lama-pendapatan-lebih-kecil)
- Walby, S. (2022). Crisis and society: developing the theory of crisis in the context of COVID-19. *Global Discourse*, 12(3–4), 498–516. <https://doi.org/10.1332/204378921X16348228772103>
- Yasa, I. M. P. (2022). Tantangan Tenaga Kerja di Provinsi Bali Setelah Pandemi Covid-19. *Nusantara Hasana Journal*, 2(2), 2–7. <http://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/download/392/258>
- Yudhiantara, I. M., Putri, N. P. D. K., Wibawa, I. G. A., & Antarini, L. (2024). Governance Perspective on Village Development in Bali: A Study of Tegal Harum Smart Village. *International Journal of Religion*, 5(11), 7499–7511. <https://doi.org/10.61707/ddkxwr09>